

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bagian terakhir penelitian ini akan disajikan kesimpulan umum dari keseluruhan uraian tentang kelembagaan politik menurut Hasan Al Banna.

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian terhadap perjalanan hidup Hasan Al Banna, latar belakang pemikiran, serta pemikiran yang di kemukakan Hasan Al Banna tentang kelembagaan politik, maka dapat disimpulkan bahwa : Hasan Al Banna merupakan salah satu referensi bagi pemikiran politik Islam, memiliki keistimewaan dengan membangun organisasi modern yang sangat berpengaruh mendunia yaitu Ikhwanul Muslimin. Pemikiran Hasan Al Banna lahir dari pemahaman terhadap ajaran Islam serta keprihatinan terhadap kondisi Mesir terutama kondisi pemerintahan pada tahun 1922 sampai 1952. Penjajahan Inggris dan intervensi yang dilakukan terhadap Mesir sejak 14 September 1882, menjadi hal signifikan yang berpengaruh dalam pemikirannya. Pemikiran Hasan Al Banna termasuk memiliki keterkaitan dan terpengaruh dari beberapa pemikir sebelumnya seperti, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dengan ciri khas pemikirannya adalah perjuangan Islam yang ketat memegang prinsip syariat namun tetap mengedepankan strategi yang logis dan realistis.

Pemikiran Hasan Al Banna tentang kelembagaan politik bersifat global dan universal sehingga memungkinkan untuk diterapkan dimana saja sesuai dengan kondisi dan keadaan negaranya. Konsep kelembagaan politik ini merupakan salah satu sarana dan strategi yang dibuat Hasan Al Banna untuk mengembalikan perwujudan pemerintahan Islam di dunia. Gagasan kelembagaan politik Hasan Al Banna merupakan bentuk atau format baru kelembagaan politik yang mencoba memperbaiki kelembagaan politik yang tidak berjalan efektif di Mesir. Hasan Al Banna menjelaskan kelembagaan politik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Keistimewaan pemikiran Hasan Al Banna tentang Kelembagaan Politik ini terletak pada titik tekan bahwa Pemerintah dalam Islam tegak diatas tiga pilar yaitu, tanggung jawab pemerintah, persatuan umat, dan menghargai aspirasi rakyat. Sistem yang ditekankan Hasan Al Banna adalah Sistem Republik Parlementer dengan penekanan kehendak rakyat sebagai sumber kekuasaan. Hasan Al Banna tidak membatasi bidang-bidang dalam penyelenggaraan negara, tetapi secara umum sistem politik Islam kekuasaan negara meliputi beberapa bidang yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif, kontrol dan evaluasi. Dalam mewujudkan idealita gagasan Al Banna dibutuhkan penopang atau pendukung berupa sistem dalam pemerintahan yang mendukung dan masyarakat yang memiliki kesadaran politik.

## B. Saran

Setelah mengkaji pemikiran Hasan Al Banna tentang kelembagaan politik terdapat beberapa catatan yaitu, adanya konsep yang global dan umum dari pemikirannya sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi negara untuk mengaplikasikan konsep kelembagaan politik ini. Perlu adanya pembumihancitaan karena pemikirannya tentang kelembagaan politik berhubungan erat dengan usaha pembentukan negara yang sesuai dengan konsep Islam. Kelemahan dari pemikiran Hasan Al Banna tentang Kelembagaan Politik adalah tidak adanya konsep atau bentuk kelembagaan yang ditawarkan oleh Hasan Al Banna, karena Al Banna lebih banyak melihat dan melakukan evaluasi terhadap lembaga yang ada di Mesir. Masalah kelembagaan adalah masalah penerapan lembaga secara *top down*, sedangkan Hasan Al Banna hanya mengkritisi dan berperan sebagai oposan sehingga untuk merubah lembaga yang ada menjadi sesuai idealitanya sulit untuk terwujud, dan solusinya adalah dengan masuk ke sistem pemerintahannya dan merubahnya dari dalam, dan hal tersebut tidak diulas oleh Hasan Al Banna.

Berdasarkan pemikiran Hasan Al-Banna tersebut dapat diimplementasikan apabila partai-partai yang berideologi Islam dapat memenangkan pemilu sehingga dapat menguasai pemerintahan sehingga setidaknya dapat mendekati pemikiran Hasan Al Banna.